

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Komunikasi

##### 1. Pengertian Komunikasi

Ditinjau dari asal katanya, istilah komunikasi diturunkan dari kosakata Latin *communicare* atau *communis* (artinya 'sama'), mengisyaratkan bahwa kata ini merujuk pada kesepahaman makna, khususnya dalam interaksi dengan pihak lain mengenai suatu hal<sup>13</sup>. Jadi Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang melibatkan pertukaran makna antara dua pihak atau lebih. Komunikasi merupakan proses dasar dalam kehidupan manusia yang memungkinkan pertukaran makna, ide, nilai, dan pengalaman antarindividu atau kelompok. Menurut Lasswell, komunikasi dapat dijelaskan melalui pertanyaan: " *who says what in which channel to whom with what effect?*"- yang menunjukkan adanya pengirim ( komunikator), isi pesan, saluran komunikasi, penerima pesan, dan efek Komunikasi <sup>14</sup> . Menurut pemikiran Anwar Arifin, komunikasi bisa dipahami sebagai rangkaian interaksi sosial yang mengandung berbagai pesan dan tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>13</sup> Didik Hariyanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (sidoarjo: umsida press, 2021).

<sup>14</sup> d Harold Laswell, "The Structure and Function of Communication in Society" (1948): 39.

perilaku atau aktivitas manusia sehari-hari<sup>15</sup>. Dalam dunia interaksi antarmanusia, terdapat dua jalur penyampaian pesan: melalui kata-kata dan tanpa kata-kata. Penyampaian lewat kata-kata terjadi ketika seseorang menggunakan suara dan pengucapan langsung atau melalui huruf-huruf yang disusun di atas media. Sementara itu, penyampaian tanpa kata-kata memanfaatkan gerakan fisik dan isyarat tubuh untuk mengekspresikan maksud tertentu, seperti ketika seseorang menarik sudut bibir ke atas sebagai tanda kesenangan, menggerakkan kepala ke kanan-kiri sebagai penolakan, atau menarik kedua pundak ke atas untuk menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian.. Sementara itu Cangara memandang komunikasi sebagai sebuah pertukaran, mekanisme pertukaran simbol ini mengharapkan individu-individu mampu menata lingkungan sekitar mereka dengan menciptakan jalinan antarmanusia melalui saling berbagi keterangan yang bertujuan memperkokoh perilaku serta pendirian pihak lain, sekaligus berupaya melakukan perubahan pada sikap dan perilaku tersebut<sup>16</sup>.

## 2. Proses Komunikasi

Rangkaian penyampaian pesan melibatkan beberapa tahap berurutan yang berlangsung saat informasi mengalir dari pihak pengirim kepada pihak penerima. Tahap pertama dimulai dengan

---

<sup>15</sup> Tunip, "Etika Berkomunikasi Era Media Digital."

<sup>16</sup> Cangara Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat* (Depok: PT:RajaGrafindo Persada, 2019).89-104

pengembangan gagasan atau pemilihan informasi oleh komunikator. Selanjutnya, gagasan tersebut diubah menjadi pesan yang dapat dipahami melalui proses *encoding*. Pesan kemudian ditransmisikan melalui media atau saluran Komunikasi yang dipilih. Penerima pesan melakukan *decoding* atau interpretasi terhadap pesan yang diterima. Proses ini dapat menghasilkan umpan Balik yang Kembali kepada Komunikator, menciptakan siklus komunikasi yang berkelanjutan<sup>17</sup>.

Bila dijabarkan secara lebih detail, proses komunikasi mencakup beberapa komponen esensial yang saling terkait. Menurut Mulyana, proses komunikasi terdiri dari delapan komponen utama : sumber ( komunikator ) , pesan, saluran,penerima ( komunikan ), efek, umpan balik, lingkungan, dan gangguan ( *noise* )<sup>18</sup>. Komunikator sebagai sumber informasi memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan komunikasi melalui kredibilitas, daya Tarik, dan kekuatan yang dimilikinya<sup>19</sup>.

Proses *encoding* merupakan tahap krusial dimana komunikator menerjemahkan ide pikiran e dalam symbol-simbol, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat dipahami oleh penerima pesan.

---

<sup>17</sup> Farhan, "Komunikasi: Arti,Proses Dan Pentingnya Dalam Kehidupan," last modified 2023, accessed February 10, 2025, <https://unsia.ac/komunikasi-arti-dan-proses-pentingnya-dalam-kehidupan-manusia/>.

<sup>18</sup> D Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).69-71

<sup>19</sup> Y Kusumastuti , *Komunikasi Bisnis: Membangun Hubungan Baik Dan Kredibilitas* (bogor: IPB press, 2018).27-29

Kemampuan komunikator dalam melakukan *encoding* sangat dipengaruhi oleh kerangka pengalaman, latar belakang budaya, dan konteks sosial<sup>20</sup>. Simamora menambahkan bahwa proses *encoding* juga melibatkan pemilihan kode bahasa, tingkat formalitas, dan gaya komunikasi yang paling sesuai dengan karakteristik penerima pesan<sup>21</sup>.

Pemilihan saluran komunikasi menjadi tahap selanjutnya yang menentukan efektivitas penyampaian pesan. Wijaya mengklasifikasikan saluran komunikasi menjadi tiga kategori: saluran audio (pendengaran), visual (penglihatan), dan audio visual<sup>22</sup>. Dalam era digital, saluran Komunikasi telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan yang menawarkan fitur komunikasi multi modal.

Proses *decoding* merupakan tahap interpretasi pesan oleh komunikan. Dalam proses ini, penerima pesan berusaha memahami makna dibalik symbol-simbol yang diterimanya. Keberhasilan proses *decoding* sangat bergantung pada kerangka referensi (*frame of reference*)

---

<sup>20</sup> Zikri Fachrul Nurhadi and Achmad Wildan Kurniawan, "Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi," *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 3, no. 1 (2017): 90–95.

<sup>21</sup>R Simamora, "Pengaruh Perbedaan Individual Terhadap Proses Encoding Dalam Komunikasi Antar Budaya," *jurnal komunikasi dan kajian media* 3 (2019): 166–178.

<sup>22</sup> Suryani Ida Wijaya, "Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan," *Jurnal Lentera* 17, no. 1 (2015).53-61

dan bidang pengalaman ( *field of experience*) yang dimiliki oleh penerima pesan<sup>23</sup>.

Hambatan atau *noise* dalam proses komunikasi dapat terjadi pada setiap tahapan. Ardianto mengkategorikan hambatan komunikasi menjadi tiga jenis: hambatan teknis ( berkaitan dengan saluran komunikasi), hambatan semantic( berkaitan dengan perbedaan pemaknaan simbol), dan hambatan psikologis ( berkaitan dengan kondisi psikologis komunikator atau komunikan )<sup>24</sup>.

Efektivitas proses komunikasi dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti ketetapan pemahaman pesan, perubahan sikap dan perilaku komunikan, serta tercapainya tujuan Komunikasi. Dalam konteks komunikasi Pemerintahan, indikator keberhasilan komunikasi juga mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi informasi public, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan<sup>25</sup>.

## **B. Komunikasi Pemerintahan**

Komunikasi pemerintahan merupakan aspek penting penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam pemerintan, komunikasi

---

<sup>23</sup> T Wahyudi, "Proses Decoding Dalam Komunikasi Lintas Budaya: Studi Kasus Pada Mahasiswa Internasional Di Indonesia," *jurnal komunikasi global* 9 (2020): 226–243.

<sup>24</sup> E Ardianto, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: simbiosis rekayasa media, 2016).87-92

<sup>25</sup> Mahdar Mahdar and Maudhy Satyadharma, "Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 Pada Pelabuhan Penyeberangan Baubau Dan Pelabuhan Penyeberangan Waara," *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA* 15, no. 02 (2023): 100–108.

memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi pemerintahan adalah bentuk interaksi antar manusia yang berlangsung dalam lingkup institusi pemerintah. Oleh karena itu komunikasi pemerintahan selalu terkait dan merupakan bagian integral dari pola komunikasi organisasi<sup>26</sup>.

Fungsi Komunikasi pemerintahan mencakup peran dan tanggung jawab para komunikator dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta mendengarkan kebutuhan Publik. Wahyudi menjelaskan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan upaya pemerintah untuk menyampaikan kebijakan, program, dan informasi kepada masyarakat sekaligus menerima umpan balik dari warga negara<sup>27</sup>. Menurut Rizky wahyudi Ada beberapa fungsi Komunikasi Pemerintahan meliputi:

1. Menjadi kepala kepentingan umum dan memelihara komunikasi yang baik
2. Berperan sebagai fasilitator komunikasi dan teknisi komunikasi
3. Memfasilitasi komunikasi partisipatif yang berlangsung secara dialogis dan terbuka
4. Memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

---

<sup>26</sup> Iswahyudi, "Peranan Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori," *Jurnal Gema Kampus* 12, no. 1 (2017): 26.

<sup>27</sup> Djoko Wahyudi, *Komunikasi Pemerintahan* (Bandung: simbiosis rekatama, 2017).35-36

Namun, komunikasi pemerintahan juga menghadapi berbagai tantangan. Terkadang, pesan yang disampaikan oleh pemerintah bisa disalah artikan atau tidak sampai kepada khayalak dengan baik. Faktor seperti keterbatasan media, distorsi media, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menghambat tercapainya komunikasi yang efektif. Menurut Eliza, dalam artikelnya keberhasilan komunikasi dalam pemerintahan terjadi apabila makna yang dimaksud oleh pengirim pesan dapat dipahami secara selaras oleh penerima pesan, oleh karena itu, Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa Tujuan yang akan dicapai yakni:

- a. Menciptakan kesamaan pandangan dan makna tentang setiap kebijakan
- b. Membangun hubungan yang baik dan menjaga kepercayaan dengan masyarakat
- c. Mencapai kesepahaman Bersama antara komunikator dan komunikan<sup>28</sup>

Karakteristik komunikasi pemerintahan memiliki beberapa kekhasan yang membedakannya dari bentuk Komunikasi yang lainnya. Menurut Yunita dalam penelitiannya karakteristik komunikasi pemerintahan meliputi penyebaran dan pertukaran informasi dalam dan luar organisasi. Menurutnya, aspek utama dalam komunikasi pemerintahan yang pertama,

---

<sup>28</sup> Eliza Haryatun, "Digitalisasi Komunikasi Pemerintahan Di Kabupaten Natuna," last modified 2023, accessed February 11, 2025, <https://setda.natunakab.go.id/digitalisasi-komunikasi-pemerintahan-di-kabupaten-natuna/>.

pemahaman tentang komunikasi, Sebagian besar pejabat pemerintah memahami komunikasi, tetapi tidak semua tahu cara berkomunikasi yang efektif terutama dalam konteks pemerintahan. Yang kedua adalah tata Kelola yang baik komunikasi pemerintahan menekankan responsivitas, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas<sup>29</sup>.

### C. Teori Tindakan Komunikatif Habermas

#### 1. Latar Belakang Pemikiran Jurgen Habermas

Tokoh bernama Jurgen Habermas lahir pada 18 Juni 1929 di Dusseldorf, Jerman. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam pemikiran social dan politik abad ke-20, dikenal terutama karena kontribusinya dalam teori kritis dan teori diskursus. Pengalaman hidupnya selama perang dunia II dan masa pasca perang sangat mempengaruhi pandangannya tentang masyarakat dan komunikasi yang kemudian menjadi landasan bagi pemikirannya yang lebih luas tentang Rasionalitas dan demokrasi <sup>30</sup>.

Sebagai pemikir generasi kedua Mazhab Frankfurt, Habermas melanjutkan dan mengembangkan pemikiran teori kritis yang sebelumnya dirintis oleh Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Jurgen Habermas menambahkan konsep komunikasi

---

<sup>29</sup> Yunita, "Analisis Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar," *jurnal penelitian* (2019): 30.

<sup>30</sup> Shahwirman Tizar, "Diskursus Metodologi Ilmu Sosial: Pandangan Jürgen Habermas Dan Kritik Atasnya." (Driyarkara School of Philosophy, 2023).<sup>30</sup>

di dalam teori Kritis<sup>31</sup>. Teori tindakan komunikatif lahir dari kegelisahan Jurgen Habermas atas krisis rasionalitas masyarakat modern pasca-perang dunia II. Rasionalitas yang dominan kala itu bersifat instrumental berorientasi pada efisiensi ekonomi dan kontrol birokrasi sehingga menekankan ruang dialog warga (*life world*) dan melemahkan partisipasi publik<sup>32</sup>

Untuk menjawab tantangan ini, Habermas memadukan tradisi Teori Kritis Mazhab Frankfurt ( Horkheimer, Adorno) dengan filsafat tindak-tutur ( Austin, Searle ). Hasilnya adalah konsep rasionalitas komunikatif, yaitu rasionalitas yang terwujud ketika para subjek bertukar argumen secara setara demi mencapai kesepakatan bebas dominasi<sup>33</sup>. Sejak diterbitkannya *The theory of communicative Action* (1981), teori tindakan komunikatif menjadi fondasi bagi studi demokrasi deliberatif, etika diskursus, dan komunikasi organisasi. Dengan demikian, warisan pemikiran Habermas akan terus berpengaruh dalam diskusi tentang demokrasi, hukum, dan etika social dimasa depan<sup>34</sup>.

#### D. Konsep Dasar

---

<sup>31</sup> Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: kanisius, 2009).55-60

<sup>32</sup> Jurgen Habermas, "The Theory of Communicative Action" 1 (1984): xxv-xxx.

<sup>33</sup> Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*.14

<sup>34</sup> N Frazer, *The Theory of the Public Sphere: The Structural Transformation of the Public Sphere* (Colombia: colombia university Press, 1962).230

Teori Tindakan Komunikatif (*theory of communication Action*) yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas (1929) merupakan elaborasi paling komprehensif dari proyek teori kritis generasi kedua Mazhab Frankfurt<sup>35</sup>. Habermas berupaya menggantikan model rasionalitas-instrumental modernitas dengan rasionalitas komunikatif, yakni rasionalitas yang berakar pada praktik Bahasa sehari-hari dan bertujuan mencapai pemahaman intersubjektif ketimbang sekadar keberhasilan teknis<sup>36</sup>. Dalam perspektif Habermas, tindakan komunikatif adalah aktivitas komunikasi sosial yang didasarkan pada rasionalitas intersubjektif, dimana hubungan sosial ideal dibangun melalui pertukaran gagasan yang rasional, terbuka, dan setara antara subjek-subjek komunikatif<sup>37</sup>. Melalui komunikasi yang bersifat intersubjektif ini, individu tidak hanya bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga berkewajiban untuk menerima kritik rasional yang membangun dari pihak lain.

Teori tindakan komunikatif dikembangkan sebagai bentuk kritik terhadap dominasi rasionalitas yang bersifat instrumen dan objektif. Teori ini bertujuan untuk merekonstruksi kembali cara berpikir rasional dengan menekankan pentingnya komunikasi sebagai sarana pembebasan dan

---

<sup>35</sup> Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*.14

<sup>36</sup> Habermas, "The Theory of Communicative Action."213

<sup>37</sup> Dimas Rahman Rizqian, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas," *Jurnal El-Hamra: Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2023): 71–86.

pemberdayaan manusia<sup>38</sup>. Dalam pandangannya, teori ini menyampaikan bahwa proses memahami tindakan manusia bisa dianalisis secara konstruktif melalui simbol atau tuturan yang memiliki struktur kebahasaan<sup>39</sup>, setiap ujaran yang disampaikan, idealnya berlangsung tanpa tekanan atau dominasi, dan dibangun atas dasar kebebasan berpendapat<sup>40</sup>. Struktur kebahasaan dalam komunikasi ini dipandang sebagai fondasi untuk membangun pemahaman normatif dalam masyarakat. Gagasan ini dimanfaatkan untuk memberikan landasan dalam memahami kehidupan sosial modern secara lebih kontekstual dan sesuai dengan kompleksitas zaman<sup>41</sup>

Teori tindakan komunikatif memahami bahasa sebagai komponen dasar masyarakat dan merupakan upaya untuk memperbaharui Marxisme dengan "mengambil teori sistem (Luhmann), psikologi perkembangan, dan teori sosial dari Weber, Durkheim dll<sup>42</sup>

Berdasarkan pemikirannya yang semula dikembangkan dalam konteks interaksi sosial pragmatis, Habermas kemudian berhasil memperluas lingkup teorinya untuk menjangkau pemahaman masyarakat

---

<sup>38</sup> Thomas A. McCarthy, *The Critical Theory of Jürgen Habermas* (Cambridge, MA: The MIT Press, 1981), 272.

<sup>39</sup> Barbara Fultner, *Pendahuluan: Tindakan Komunikatif dan Pragmatik formal, dalam Jürgen Habermas: Konsep-konsep Utama*, ed. Barbara Fultner (Durham: Acumen, 2011), 4

<sup>40</sup> Thomas A. McCarthy, *The Critical Theory of Jürgen Habermas* (Cambridge, MA: The MIT Press, 1981), 275.

<sup>41</sup> Jürgen Habermas "Teori Tindakan Komunikatif Volume 1 (Boston MA: Beacon Press 1984), xl.

<sup>42</sup> Barbara Fultner, *Pendahuluan: Tindakan Komunikatif dan Pragmatik formal, dalam Jürgen Habermas: Konsep-konsep Utama*, ed. Barbara Fultner (Durham: Acumen, 2011), 52

secara lebih luas. Thomas A McCarthy menjelaskan bahwa teori tindakan Komunikatif mencakup tiga fokus utama yang saling berhubungan: (1) membentuk rasionalitas yang tidak lagi dikendalikan oleh pandangan individualistik, melainkan bergantung pada landasan subjektif dan sosial yang dipengaruhi oleh teori sosial dan filsafat modern; (2) menyusun model masyarakat dua tingkat yang menggabungkan cara hidup sehari-hari dengan struktur sistemik secara terpadu; dan (3) merumuskan kerangka kritis terhadap modernitas dengan menjelaskan berbagai masalah sosial melalui pendekatan analitis, tanpa mengabaikan proyek pencerahan, tetapi justru menyempurnakannya<sup>43</sup>.

Habermas dalam bukunya *Teori Tindakan Komunikatif*, Volume 1 ingin mengembangkan konsep rasionalitas yang tidak hanya terbatas pada pemikiran modern yang bersifat individual dan subjektif<sup>44</sup>. Karena pencarian dasar filsafat modern gagal, ia menyarankan agar rasionalitas diuji secara ilmiah dan berdasarkan ilmu sosial, bukan hanya pada kesadaran atau pemikiran awal manusia saja.

Habermas menolak klaim bahwa sesuatu bisa berlaku universal tanpa diuji secara nyata. Ia ingin teori sosial yang bisa diuji lewat contoh nyata dari sejarah dan budaya yang berbeda, bukan sekadar teori umum.

---

<sup>43</sup> Thomas A. McCarthy, vi

<sup>44</sup> McCarthy 1984 vi

Ia kemudian mengembangkan teori tindakan komunikatif sebagai pembaruan dari teori sosiologi, terutama dari pemikiran Max Weber. Menurut Habermas, pandangan Weber tentang tindakan manusia terlalu sempit karena terlalu fokus pada tujuan dan produksi. Habermas juga mengkritik teori tindakan Weber yang terlalu menekankan pada individu yang bertindak sendiri, tanpa mempertimbangan hubungan sosial dan komunikasi dengan orang lain<sup>45</sup>. Anwar, dalam jurnalnya mengatakan bahwa Habermas mengkritik positivisme karena mengabaikan logika Komunikasi. Ia menyatakan bahwa tindakan komunikatif melibatkan dua atau lebih individu yang berbicara dan bertindak bersama. Mereka berusaha mencapai pemahaman bersama tentang situasi dan rencana tindakan, sehingga dapat menyelaraskan tindakan mereka secara konsensus. Kunci dari tindakan komunikatif adalah adanya proses negosiasi untuk mendefinisikan situasi bersama secara rasional<sup>46</sup>.

Rasionalitas komunikatif adalah konsep yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya komunikasi sebagai proses rasional untuk mencapai pemahaman bersama dan konsensus dalam interaksi sosial. Berbeda dengan rasionalitas instrumental yang berorientasi pada tujuan dan efisiensi, rasionalitas komunikatif berfokus pada dialog terbuka, argumentasi, dan pertukaran alasan yang jujur dan adil untuk

---

<sup>45</sup> Habermas 1984 280

<sup>46</sup> Nuris Anwar, "Tindakan Komunikatif: Sekilas Tentang Pemikiran Jürgen Habermas," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 1 (2016): 39–66.

mencapai kesepakatan yang sah secara sosial dan moral<sup>47</sup>. Rasionalitas Komunikatif menjadi dasar penting dalam membangun hubungan sosial yang demokratis, di mana setiap orang di beri ruang untuk menyampaikan pendapat secara setara.

Teori ini sangat penting dalam studi sosial dan politik modern, terutama untuk menghadapi tantangan masyarakat yang kompleks dan beragam. Rasionalitas komunikatif menjadi alat untuk mengatasi dominasi sistem dan memastikan partisipasi yang setara di ruang publik, sehingga mendorong terbentuknya masyarakat yang demokratis dan adil

Habermas membedakan Tindakan teleologis yang berorientasi hasil dengan Tindakan komunikatif yang berorientasi pada tercapainya *mutual understanding* diantara para partisipan diskursus<sup>48</sup>. Dalam teori tindakan komunikatif, ada beberapa konsep kunci yang saling berkaitan diantaranya:

1. Klaim kesahihan

Dalam Tindakan komunikatif, Menurut Habermas, setiap pernyataan dalam komunikasi membawa Klaim kesahihan yang dapat diuji, yaitu klaim kebenaran (*Truth*), kejelasan (*clarity*), ketulusan (*sincerity*) dan kebenaran normatif (*Normative Truth*)<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Dimas Aditya Wicaksono, "Habermas Dan Proyek Pencerahan Yang Masih Mungkin," last modified 2020, accessed April 26, 2025, <https://lsfcogito.org/habermas-dan-proyek-pencerahan-yang-masih-mungkin/>.

<sup>48</sup> Ibid 215

<sup>49</sup> Nurudin, *Komunikasi Politik: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).180

Habermas menyatakan bahwa suatu pernyataan atau tindakan dianggap rasional apabila alasan-alasannya dapat dijelaskan dan diterima secara bersama-sama ( intersubjektif). Menurut Habermas, semua komunikasi yang efektif harus memenuhi keempat klaim tersebut diatas dan barangsiapa yang mengkomunikasikan keempat klaim validitas tersebut memiliki kompetensi komunikatif. Jika semua peserta diskusi dapat menyajikan semua argumen yang relevan pada saat itu, sehingga asumsi yang berperan dalam diskusi juga dapat dikritik dan, jika sangat diinginkan oleh para peserta.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi dan terjadi konsensus di antara para peserta, maka konsensus semacam itu dapat dikatakan konsensus yang rasional, sepanjang hanya bertumpu pada kekuatan argumentasi yang terbaik<sup>50</sup>. Dari keempat klaim yang telah dijelaskan di atas, dua ciri utama dari klaim kesahihan yang rasional adalah kemampuan untuk memberikan penjelasan dan dasar pembenaran. Tidak semua komunikasi memiliki ciri ini; secara umum, terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi naif dan komunikasi reflektif.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung memakai komunikasi naif, tetapi ketika suatu percakapan menyentuh kepentingan orang lain atau norma bersama dipertanyakan, maka konsensus yang sebelumnya diterima tanpa sadar menjadi terganggu.

---

<sup>50</sup> Zaprukh, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*

Pada situasi inilah diperlukan upaya untuk menafsir, menjelaskan, atau membenarkan klaim-klaim kesahihan tersebut<sup>51</sup>.

## 2. Situasi wicara ideal

Habermas menegaskan empat prasyarat situasi wicara ideal (*ideale Sprechsituation*): (a) kebebasan berpartisipasi;(b) kesetaraan kesempatan berbicara;(c) tidak ada paksaan selain paksaan argument terbaik; dan (d) orientasi tulus pada konsensus<sup>52</sup>. Bila prasyarat ini terpenuhi, hasil diskursus memiliki legitimasi karena berdasar persetujuan semua pihak secara tidak terpaksa<sup>53</sup>

## 3. Dunia Kehidupan ( *Lifeworld* )

Habermas menggambarkan dunia kehidupan sebagai ruang budaya, nilai-nilai, dan praktik sosial yang membentuk konteks pemahaman antara individu<sup>54</sup>. Menurut Habermas, dunia kehidupan (*life world*) adalah dunia yang dialami sehari-hari oleh manusia, penuh dengan peristiwa-peristiwa unik, ikatan budaya, penggunaan bahasa sehari-hari, serta pemaknaan sosial yang membentuk pemahaman kolektif<sup>55</sup>. Habermas menegaskan bahwa dunia kehidupan terancam

---

<sup>51</sup> Irfan Noor, "Identitas Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2016): 61–87.

<sup>52</sup> Otto Gusti Ndegong MADUNG, "Memperkenalkan Pemikiran Jurgen Habermas" (2016).12

<sup>53</sup> Maria Bakardjieva, "On Communicative Rationality with Passion," *Javnost-The Public* 31, no. 1 (2024): 46–63.

<sup>54</sup> Anwar Saifuddin, "Diskursus dan Rasionalitas komunikatif dalam membangun partisipasi Publik", *Jurnal Komunikasi Indonesia* vol 9 no 1 (2020):124

<sup>55</sup> Gustaf Hariyanto, "Sistem Dan Dunia-Kehidupan Menurut Jurgen Habermas,"

oleh dominasi sistem ( teknologi dan birokrasi) yang cenderung menggantikan interaksi alami dengan logika kontrol teknis. Untuk melindungi dunia kehidupan dari kolonisasi sistem, habermas menawarkan solusi berupa dialog dan komunikasi publik yang bebas dari dominasi<sup>56</sup>.

Dalam konteks pemerintahan desa/lembang, teori ini menyoroti perlunya memindahkan praktik komunikasi dari pola *top-down* menuju dialog deliberative. Kepala Lembang, perangkat, dan warga idealnya menjadi partisipan setara yang saling menguji klaim kesahihan seputar program Pembangunan desa <sup>57</sup> . Dengan begitu, Keputusan kolektif memperoleh legitimasi bukan karna kewenangan formal , melainkan karena rasionalitas argumen yang diterima secara sukarela <sup>58</sup>

---

*Borneo Review* 1, no. 1 (2022): 1–13.

<sup>56</sup> Ibid 23

<sup>57</sup> Rizqian, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas." 35

<sup>58</sup> prasetyo B "Variasi Implementasi Komunikasi Dialogis Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Studi Komparatif Di Pulau Jawa Dan Sulawesi." *Jurnal politik lokal* vol 5 (2023),12-15